

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan dalam bab-bab diatas maka dapat disimpulkan bahwa tanggung Jawab dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Konsil Kedokteran Indonesia dalam penyelesaian pelanggaran ketentuan administratif praktik kedokteran, sebagai berikut:

- a. Konsil Kedokteran Indonesia bertanggung jawab dalam lingkup pemberian Surat Tanda Registrasi dokter dan dilanjutkan dengan pelaksanaan fungsi KKI lainnya termasuk fungsi pembinaan. Fungsi pembinaan KKI dilaksanakan salah satunya dengan pembentukan lembaga otonom yang berwenang untuk menentukan dokter telah melakukan pelanggaran disiplin praktik kedokteran atau tidak dan menjatuhkan sanksi disiplin atas pelanggarannya. Lembaga tersebut adalah Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. KKI bertanggung jawab melalui MKDKI untuk menerima setiap aduan dari pihak yang merasa dirugikan atas sikap tindak dokter atas pihaknya, termasuk adanya pemalsuan STR atau tidak memiliki STR. Pengaduan bisa dilakukan secara tertulis maupun lisan kepada MKDKI.
- b. Kendala yang dihadapi KKI dalam pelaksanaan registrasi dokter antara lain adalah karena belum tersedianya peraturan tentang keseragaman kodefikasi registrasi dokter dan dokter gigi, kurang pahamiya dokter dan dokter gigi tentang tata cara registrasi ulang, sehingga banyak terjadi keterlambatan baik di Kolegium maupun di organisasi profesi, belum terkoordinasinya pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan praktik kedokteran dan kedokteran gigi antara KKI dengan pengandil lain dan belum optimalnya penanganan kasus di daerah. Selain adanya kendala yang dihadapi oleh KKI, untuk memperbaiki sistem dan proses penegakkan disiplinnya yang kurang maksimal, KKI juga mengungkapkan beberapa upaya yang telah dilakukannya, antara lain

melakukan koordinasi dengan Organisasi Profesi dan kolegium untuk mengupayakan sosialisasi pengumpulan SKP dokter dan dokter gigi serta penerbitan sertifikat kompetensi dalam rangka registrasi ulang dan perbaikan regulasi tata cara penanganan kasus mulai dari penerimaan pengaduan, investigasi, pemeriksaan, persidangan, sampai dengan keputusan, serta KKI dan MKDKI melakukan koordinasi dengan Organisasi Profesi, Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah dalam penanganan kasus di daerah.

## V.2 Saran

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai tanggung jawab KKI dan kendala-kendala yang dihadapinya dalam penegakkan disiplin administratif praktik kedokteran dapat disimpulkan beberapa saran demikian:

- a. Dengan banyaknya kendala dan upaya yang terus dilakukan oleh KKI pada sistem registrasi dokter, diharapkan KKI juga dapat selalu memperbarui regulasi registrasi dokter sesuai dengan perkembangan jaman, sehingga tidak dirasakan sulit dan menimbulkan keengganan para dokter untuk mendaftarkan diri mereka. Dengan menertibkan STR maka dapat terjadi pelayanan kesehatan yang maksimal dari tenaga medis, berhubungan dengan registrasi dokter, akan lebih baik jika dari pihak yang akan mempekerjakan dokter, misalnya seperti Rumah Sakit atau lembaga kesehatan lainnya, menjadi lebih tegas mengenai ada atau tidaknya STR yang dimiliki dokter yang ingin melamar tersebut;
- b. Pemenuhan tanggung jawab KKI dalam fungsi pembinaannya tidak akan terlepas dari pembiayaan. Pengalokasian biaya yang bijaksana pada sektor-sektor tertentu sesuai fungsinya akan sangat mempengaruhi kinerja kerja tiap divisi pelaksanaan fungsi KKI.